

TINGKAT LITERASI MEDIA MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA

Christiany Juditha

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar,
 Jl. Prof. Dr. Abdurahman Basalamah II No. 25, Makassar-90123.
 E-mail: ithajuditha@yahoo.com

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada 2015-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai, baik jumlah akses, kapasitas, kualitas, maupun jangkauan, merupakan syarat utama dan harus dimanfaatkan secara optimal. Kenyataan yang ada saat ini disparitas ketersediaan infrastruktur di wilayah perbatasan Papua-Papua New Guinea masih besar. Begitu pula dengan tingkat melek/literasi media di wilayah perbatasan relatif masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang literasi media TIK masyarakat di wilayah perbatasan Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat literat terhadap media televisi. Bahkan televisi telah menjadi media utama bagi masyarakat di wilayah perbatasan Papua. Media kedua adalah telepon selular. Mayoritas responden sangat melek teknologi ini meski kebanyakan sebatas menelepon dan ber-SMS saja. Sementara untuk internet dan radio merupakan media yang paling sedikit dan jarang dimanfaatkan responden karena infrastruktur jaringan internet yang belum memadai dan tidak memiliki radio untuk dimanfaatkan sebagai media informasi dan hiburan.

Kata Kunci: literasi, media, TIK, perbatasan, Papua

Abstract

The National Long-Term Development Plan 2005-2025 mandates that public information Indonesia is projected to materialize in 2015-2019. To achieve these objectives, the availability of adequate information infrastructure, access, capacity, quality, and range, is a major requirement and must be used optimally. The fact that there is currently disparities availability of infrastructure in the border region of Papua-New Guinea is still great. Similarly, the level of media literacy in the border region is still low. This study aimed to get an overview of the ICT media literacy communities in the border region of Papua. The method used in this study is a survey with a quantitative approach. The results show that the public is very literate of the television. Even television has become the primary means for the people in the border region of Papua. The second medium is a mobile phone. The majority of respondents highly literate this technology though just to call and SMS. While the internet and radio is the most little and rarely utilized respondents as the internet network infrastructure is not adequate and does not have a radio to be used as a medium of information and entertainment.

Keywords: literacy, media, ICT, borders, Papua

Pendahuluan

Perkembangan dunia di akhir abad ke-20 ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru setelah teknologi mesin uap dan teknologi tenaga listrik. Dikatakan sebagai suatu revolusi karena merupakan suatu teknologi serbaguna (*general purpose technology*) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teknologi ini masih berkembang pesat dan dipercaya belum kelihatan titik jenuhnya dalam beberapa dekade mendatang. Perkembangan tersebut sangat menggembirakan karena kemampuan teknologi yang semakin meningkat membawa dampak antara lain pada penurunan harga yang semakin drastis. Dengan demikian pemanfaatannya menjadi semakin layak dan semakin jauh merasuki kegiatan manusia dan organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memengaruhi tatanan sosial.

Teknologi informasi, yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan

sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan global. Informasi berada pada garda depan dalam pertempuran kompetisi, mendahului aset-aset yang lain.

Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dimana informasi tersebut dikumpulkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk, organisasi, bahkan negara. Modal alam akan memiliki nilai berlebih apabila disertakan di dalamnya modal pengetahuan yang sesuai dengan modal alam tersebut. Hal yang sama akan berlaku pada modal sosial/budaya. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat akan menambah nilai modal alam dan modal sosial/budaya yang dimiliki negara, yaitu dengan mencangkokkan modal pengetahuan ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan/ditawarkan. Teknologi informasi akan sangat membantu kegiatan aktualisasi pengetahuan ini dalam skala luas oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian akan terbentuk masyarakat berbasis pengetahuan dengan daya saing tinggi karena mampu memberikan nilai tambah pada tiap kegiatan yang dilakukannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015-2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai, baik jumlah akses, kapasitas, kualitas, maupun jangkauan, merupakan persyaratan utama dan harus dimanfaatkan secara optimal, bukan saja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi dan kesejahteraan (Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika 2010-2014: 1-2).

Kenyataan yang ada saat ini bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan situasi geografis dan populasi penduduk yang heterogen, baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya, maupun agama, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital (*digital divide*). Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali. Disamping itu, kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya. Gambaran *digital divide* tersebut terlihat dari beberapa indikator, seperti persentase yang memiliki telepon di Jawa Tengah masih 6,98%, di NTB bahkan masih 4,54%, sementara di Jakarta 38,5%, dan DIY 13,1%. Dari total 72.000 desa yang ada di Indonesia, masih ada 31.824 desa yang belum terlayani akses telepon dan lain sebagainya.

Masalah lain adalah disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia masih besar. Hingga akhir tahun 2008, masih terdapat lebih dari 31 ribu desa belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet, lebih dari 80% infrastruktur pos dan telematika terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatera, serta distribusi *Internet Service Provider* (ISP) terkonsentrasi di Jawa (64% dari 306 ISP) dan 18% di Sumatera.

Selain isu terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan pos dan telematika, kondisi lain yang dihadapi sektor ini adalah belum optimalnya tingkat pemanfaatan informasi yang di antaranya terlihat dari masih terbatasnya penggunaan TIK dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan *real economic value* dan meningkatnya penyalahgunaan (*misuse dan abuse*) penggunaan TIK.

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional masih lemah yang antara lain ditandai dengan masih kurangnya infrastruktur, rendahnya penggunaan TIK dan tingkat melek masyarakat. Menurut *International Telecommunication Union* (ITU),

pembangunan TIK berindikasi tidak hanya kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi), tetapi juga penggunaan TIK dan beberapa besar tingkat melek TIK sumber daya manusianya. Dibandingkan dengan 154 negara-negara lain di dunia, data dari ITU pada tahun 2007 menempatkan Indonesia pada ranking 108. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya usaha peningkatan kualitas dan kuantitas serta kemampuan infrastruktur TIK yang makin meningkat dan terjangkau oleh masyarakat pengguna TIK. Upaya tersebut akan mampu meningkatkan kapasitas SDM dan masyarakat dalam memanfaatkan jasa akses telekomunikasi dan TIK yang secara ekonomi akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Mengacu dari latar belakang tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian tentang "Literasi Media Masyarakat di Wilayah Perbatasan Papua". Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah "bagaimana literasi media masyarakat di wilayah perbatasan Papua?" Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang literasi media masyarakat di wilayah perbatasan Papua.

Tinjauan Pustaka

Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (*multi literacies*). Ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*technology literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), bahkan ada literasi moral (*moral literacy*). Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut.

Literasi media merupakan upaya pembelajaran bagi khalayak media sehingga menjadi khalayak yang berdaya hidup di tengah dunia yang sesak dengan media. Mengacu pada pandangan para pakar literasi media (Considine,

1995; Fedorof, 2002; Silverblatt, 1995; WENO, 2003 dalam Iriantara 2009) yakni memiliki kompetensi dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media massa. Defenisi ini juga sama seperti yang ditetapkan dalam *National Leadership Conference on Media Education* yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya (Hobbs, 1999). Lebih daripada itu adalah mampu mengenali dan mengerti informasi secara komprehensif untuk mewujudkan cara berpikir kritis, seperti tanya jawab, menganalisa, dan mengevaluasi informasi itu.

Sementara jika digunakan pendekatan tritokomi, maka literasi media mencakup tiga bidang, yaitu memiliki akses ke media, memahami media dan menciptakan serta mengekspresikan diri untuk menggunakan media (Buckingham, 2003). Akses meliputi menggunakan serta kebiasaan media, artinya kemampuan menggunakan fungsi dan kompetensi navigasi, serta kompetensi mengendalikan media, dan lain sebagainya. Pemahaman artinya memiliki kemampuan untuk memahami atau menafsirkan serta memperoleh perspektif isi media serta sikap kritis terhadapnya. Sedangkan menciptakan mencakup berinteraksi dengan media (misalnya berbicara di radio, ikut serta dalam diskusi di internet, dan lain-lain), juga menghasilkan isi media. Bagi seseorang yang memiliki pengalaman mengisi berbagai media massa membuat seseorang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dan pendekatan kritis terhadap isi media.

Silverblatt menilai seseorang dikatakan memiliki keterampilan literasi media apabila dalam dirinya termuat faktor-faktor antara lain kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat, pemahaman akan proses komunikasi massa, pengembangan strategi-strategi yang digunakan untuk menganalisis dan membahas pesan-pesan media, kesadaran akan isi media sebagai 'teks' yang memberikan wawasan dan pengetahuan ke dalam budaya kontemporer manusia dan diri manusia sendiri, peningkatan kesenangan, pemahaman dan apresiasi terhadap isi media (Baran dkk, 2000:359).

Perbatasan memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan penentu bentuk suatu negara, membatasi gerakan manusia termasuk kegiatannya di bidang ekonomi. Perbatasan dapat berfungsi sebagai barrier. Pada umumnya perbatasan merupakan barrier bagi imigrasi dan impor barang dagangan tertentu. Perbatasan antara dua negara ditentukan dengan persetujuan negara yang bersangkutan dan melalui beberapa langkah yang dilakukan di meja perundingan sampai menandai perbatasan itu di medan yang sebenarnya.

Fungsi perbatasan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman dahulu fungsi perbatasan sebagai garis pertahanan, batas wilayah kekuasaan negara, serta untuk melindungi industri di dalam wilayah, pemerintah suatu negara dapat mengadakan pajak-pajak tarif tertentu, misalnya tarif-tarif tertentu, misalnya tarif lintas batas. Dan perbatasan juga mengandung fungsi legal (hukum) di mana perbatasan merupakan batas berlakunya hukum suatu negara. Penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, hendaknya mematuhi hukum-hukum yang berlaku bagi negara di mana mereka tinggal walaupun penduduk tersebut mungkin mempunyai adat istiadat yang sama dengan adat-istiadat penduduk di seberang garis perbatasan negaranya. Akan tetapi, dengan timbulnya supranasionalisme yang didasarkan atas kepentingan ekonomi dan kebudayaan, beberapa negara mau melepaskan sebagian dari kekuasaannya untuk kepentingan bersama mereka.

Wilayah atau zona perbatasan adalah bagian wilayah suatu negara yang letaknya berbatasan dengan wilayah negara lain. Wilayah perbatasan ini bersifat peralihan. Nilai-nilai yang berlaku di wilayah perbatasan ini hampir bersamaan dengan nilai-nilai yang berlaku di wilayah perbatasan di seberangnya. Jadi, wilayah perbatasan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu wilayah perbatasan bagian dalam dan wilayah perbatasan bagian luar. Kedua wilayah tersebut saling memengaruhi. Kekuatan dari pengaruh wilayah yang satu terhadap wilayah yang lain tergantung pada tingkat perkembangan ekonomi negaranya, budaya bangsanya, dan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang

bersangkutan. Umumnya wilayah perbatasan mempunyai karakteristiknya tersendiri, yaitu kerapatan penduduknya lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya; terdapat dua bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat, walaupun seringkali bahasa yang lebih universal bersifat dominan; berlaku dua jenis mata uang, yaitu mata uang dari dua negara yang berbatasan tersebut; kota-kota yang terdapat di wilayah perbatasan melayani penduduk di kedua wilayah tersebut.

Pasal 25A UUD 1945 telah menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Peraturan perundangan lain, UNCLOS 1982 yang berlaku sejak 16 November 1994 dan diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985, menegaskan pengakuan dunia internasional terhadap konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. Wilayah NKRI berbatasan dengan banyak negara. Di darat, wilayah NKRI berbatasan dengan wilayah 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan

Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut, wilayah NKRI berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Republik Demokratik Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, dan Australia. Pengelolaan batas-batas Wilayah Negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat (*Grand Design* BNPP, 2011).

Literasi media yang dimiliki seseorang dapat diukur dengan menggunakan model ataupun modul. Untuk mengukur tingkat literasi media masyarakat di wilayah perbatasan terhadap pemanfaatan telepon selular, internet, radio, dan televisi akan digunakan konsep literasi media dari *National Association for Media Literacy Education*, yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya (Hobbs, 1999). Dalam penelitian ini digunakan salah satu prinsip inti saja, yaitu pemanfaatan media untuk mendasari kerangka konseptual literasi media.

Tabel 1. Kerangka Konsep Literasi Media

Literasi Menurut <i>National Association for Media Literacy Education</i>	Keterangan	Media pada Desa Informasi maupun bukan Desa Informasi	Indikator
Mengakses	Pemahaman dan pengetahuan menggunakan dan mengakses media	- Telepon Selular - Internet - Radio - Televisi	- Media yang digunakan - Frekuensi penggunaan - Tujuan penggunaan

Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi akan memudahkan seseorang untuk saling berhubungan dengan orang lain di belahan dunia manapun. Seperti yang dikemukakan oleh McLuhan bahwa dunia sebagai ‘*a global village*’. Kemajuan teknologi komunikasi telah dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia di dalam dan di luar negeri walaupun masih banyak juga yang belum dapat menikmati akses informasi yang sudah sedemikian canggih seperti radio, televisi,

telpon, film-film, dan surat kabar, dan internet sejalan dengan itu restrukturisasi akan terjadi di dalam berbagai kehidupan masyarakat (Primawati, 2011). Salah satu contoh pada masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan.

Metode

Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena yang hasilnya dapat digeneralisasikan (Kriyantono, 2006). Metode survei dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis masalah penelitian ini berdasarkan data yang dihimpun melalui kuesioner yang diajukan kepada responden yang menjadi sampel dengan cara wawancara tatap muka.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan literasi media masyarakat di wilayah perbatasan, di Papua maka kemudian dipilih kabupaten yang juga letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga (Papua New Guini) yaitu Kabupaten Kerom, Kecamatan Arso, Desa Asyaman dan Yuwanain. Guna menghasilkan sampel yang dapat merepresentasikan populasi di seluruh lokasi penelitian, maka teknik pengambilan sampel memakai *stratified random sampling*. Stratifikasi diperlukan supaya heterogenitas dari populasi diharapkan bisa tercermin dalam sampel. Karakteristik dasar populasi yang dijadikan acuan penentuan sampel stratifikasi, di antaranya yaitu proporsi persebaran penduduk di lokasi penelitian terpilih. Pembatasan karakteristik tersebut disesuaikan dengan informasi awal yang tersedia, yaitu data jumlah penduduk pada 2 desa penelitian yang terpilih. Adapun penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Yamane menurut Jalaluddin (1998:82) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = 77 \text{ responden}$$

Penelitian ini disamping mengumpulkan data primer melalui kuesioner, juga mengumpulkan data sekunder melalui catatan atau data pendukung yang dihimpun peneliti di lapangan. Pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu mengedit, mengkodekan serta tabulasi (*data entry*), dan validasi data. Data yang sudah di-

entry dengan menggunakan SPSS 21 dalam bentuk tabel dan grafik kemudian dihitung persentasenya, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan. Persentase rata-rata jawaban responden ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = F / n$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah jawaban yang diperoleh

n = Jumlah responden (Hadi, 1981: 421).

Untuk menafsirkan besarnya persentase yang didapat dari tabulasi data, digunakan metode Supardi (1979:20) yaitu: 1-25% (Sebagian kecil); 26-49% (Hampir setengah); 50% (Setengah); 51-75% (Sebagian besar); 76-99% (Pada umumnya); 100% (Seluruhnya).

Untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas, *instrument* yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner yang terlebih dahulu dilakukan uji coba (*pre-test*) untuk memastikan apakah *instrument* tersebut merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama atau disebut juga *Internal Consistency Reliability* (Singarimbun dan Effendy, 1995).

Hasil dan Pembahasan

Identitas responden dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Responden juga kebanyakan berstatus telah menikah dengan usia terbanyak antara 15-33 tahun. Pendidikan terakhir responden terbanyak adalah tamat SMA dengan pekerjaan utama terbanyak sebagai pelajar/mahasiswa.

Literasi Media Televisi

Literasi media dalam hal penggunaan menunjukkan bahwa media televisi menjadi media utama bagi responden yang berada di wilayah perbatasan Papua. Media kedua adalah

telepon selular, menyusul internet, dan terakhir adalah radio.

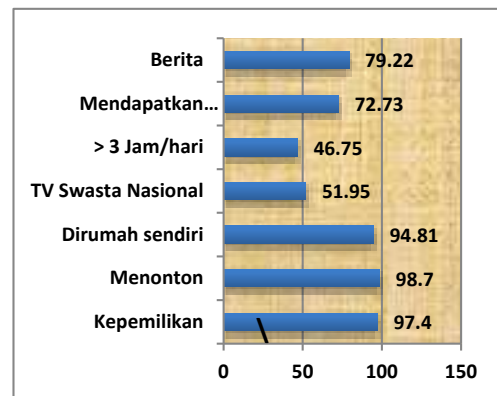
Literasi media televisi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengaku memiliki media televisi dan menonton televisi setiap hari di rumah sendiri. Sedangkan stasiun televisi yang paling sering ditonton adalah stasiun televisi swasta nasional. Kebanyakan responden menghabiskan waktu selama lebih dari 3 jam sehari untuk menonton televisi dan tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Acara televisi yang sering ditonton responden adalah siaran berita.

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan pesawat televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang televisi adalah teman, televisi menjadi cermin perilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu (Morrisan, 2004:1).

Seiring dengan majunya zaman dan semakin berkembangnya teknologi, memudahkan masyarakat termasuk di wilayah perbatasan untuk memperoleh informasi dari berbagai media salah satunya adalah televisi. Televisi merupakan sarana untuk memperoleh informasi/berita, hiburan, dan lain sebagainya sehingga lebih memudahkan audiens untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Dapat dilihat dari data hasil penelitian di atas bahwa masyarakat Indonesia khususnya di wilayah perbatasan lebih banyak menggunakan televisi sebagai media informasi. Hal ini karena stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program dengan jumlah sangat banyak dan beragam. Apapun bisa dijadikan program untuk ditayangkan selama itu menarik dan disukai khalayak.

Bahkan tidak sedikit masyarakat di perbatasan juga terhubung dengan antena parabola yang memungkinkan mereka menerima siaran dari berbagai stasiun siaran baik dalam maupun luar negeri. Beragam informasi yang diterima tersebut yang perlu diseleksi atau dengan kata lain sebagai audiens harus lebih selektif dalam memilih program acara televisi.

Karena apa yang disiarkan melalui televisi tidak selamanya dapat bermanfaat bagi khalayak.

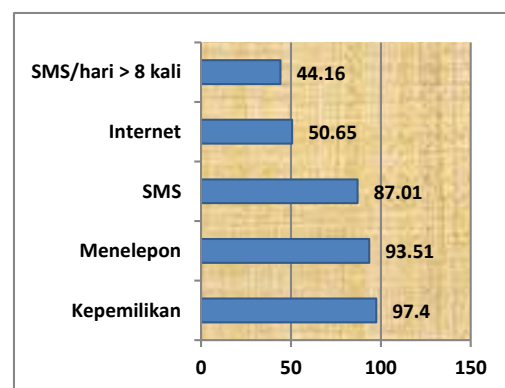


Grafik 1. Literasi Media Televisi

(Sumber: Data primer diolah, 2014. n=77)

Literasi Telepon Selular

Menoleh kepada telepon selular sebagai media kedua yang banyak dimanfaatkan oleh responden menunjukkan bahwa teknologi ini bukan lagi menjadi hal yang baru karena sebagian besar responden telah memilikinya. Meski hasil penelitian menyebutkan bahwa teknologi ini hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi saja melalui telepon dan pesan singkat atau SMS, namun tidak mengurangi tingkat melek media responden terhadap teknologi ini. Sebagian besar responden memiliki tingkat literasi cukup tinggi karena lebih dari setengah responden mampu memanfaatkannya dengan baik. Dengan telepon selular yang merupakan teknologi informasi dan komunikasi, responden dimudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain.



Grafik 2. Literasi Telepon Selular

(Sumber: Data primer diolah, 2014. n=77)

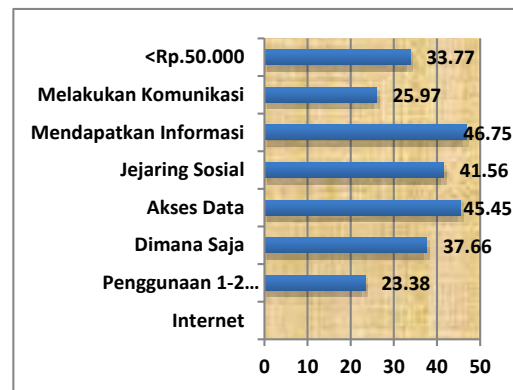
Meski termasuk wilayah perbatasan, namun pemanfaatan media TIK seperti telepon selular bukan lagi media yang langka. Seperti yang dikemukakan dalam hasil penelitian bahwa sebagian besar responden telah menggunakan telepon selular. Seperti yang dilansir Vivaneews (2014), pengguna ponsel di Indonesia lebih besar daripada jumlah penduduknya. Berdasarkan data US Cencus Bureau pada Januari 2014, Indonesia memiliki sekitar 251 juta penduduk. Jumlah itu kalah dibanding pengguna ponsel, yang berkisar di angka 281 juta. Dengan kata lain, setiap penduduk Indonesia bisa memiliki lebih dari satu telepon genggam untuk mengakses informasi. Secara global, berdasarkan data dan survei yang sama, bumi mempunyai 7 miliar jumlah penduduk. Sekitar 6,5 miliar jiwa memiliki ponsel. Artinya wilayah perbatasan ikut mendapatkan imbas dari perkembangan telepon selular di Indonesia.

Banyaknya pengguna *handphone* di daerah perbatasan ini juga ditunjang oleh infrastruktur memadai. Telkomsel pertama kali beroperasi di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini pada 17 Oktober 2005, dengan layanan 2G yang beroperasi pada frekuensi GSM (900 MHz). Di wilayah perbatasan yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.200 jiwa tersebut, Telkomsel memiliki 3 BTS (2 BTS 2G dan 1 BTS 3G) yang mampu meliputi kampung Skow, Wutung, dan Perbatasan (Tribunnews, 2014).

Literasi Internet

Literasi media TIK berikutnya yang dimanfaatkan masyarakat perbatasan adalah internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internet masih sangat kurang dimanfaatkan oleh masyarakat di desa Asyaman dan Yuwanai. Ini disebabkan karena infratraktur TIK untuk dapat berinternet dengan baik di wilayah perbatasan terbilang sangat minim dan jaringan internet yang masih sangat lambat. Sehingga wajar jika masyarakat setempat masih sedikit memanfaatkannya dibanding telepon selular. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai siswa/mahasiswa yang kebanyakan memanfaatkannya karena tuntutan pendidikan mereka. Disamping itu kemampuan literasi media TIK oleh kaum muda sangat

memungkinkan mereka lebih banyak menggunakannya dibanding masyarakat lainnya.



Grafik 3. Literasi Internet

(Sumber: Data primer diolah, 2014. n=77)

Sebenarnya untuk mengatasi kesenjangan digital khususnya media internet inilah hingga desa informasi dibangun di wilayah-wilayah tertinggal termasuk di daerah perbatasan. Desa informasi merupakan salah satu program unggulan dan upaya Kementerian Kominfo untuk memperkecil kesenjangan informasi (*digital divide*) dan membentuk masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*) secara merata dalam mencapai masyarakat informasi yang sejahtera melalui pembangunan infrastruktur TIK. Namun, harus diakui beberapa kajian tentang evaluasi program desa informasi menunjukkan bahwa program tersebut belum maksimal. Seperti kajian yang dilakukan Wahyono (2010) dengan judul “Optimalisasi Program Desa Informasi melalui Penguatan Kelembagaan”. Hasil penelitian menemukan bahwa program Desa Informasi belum mencapai hasil yang optimal. Faktor penyebabnya, program itu dilaksanakan dengan determinisme teknologi dan cenderung mengabaikan determinisme sosial budaya. Aspek kelembagaan yang mestinya berperan dalam pengelolaan selanjutnya desa informasi kurang mendapat perhatian. Hasil penelitian di 2 desa di perbatasan Papua ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan internet melalui warnet besutan Kominfo yaitu Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) juga cenderung rendah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa hanya 3,9% responden yang memanfaatkan sarana PLIK dan 7,79% untuk MPLIK.

Mengatasi kesenjangan digital di wilayah perbatasan, sektor swasta juga tidak tinggal diam. Telkomsel pada September 2014 mulai mengoperasikan layanan 3G di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini yang merupakan layanan 3G pertama di daerah tersebut. Kini masyarakat yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dapat menikmati layanan data di ponsel mereka dan mengakses internet, di mana hal ini diharapkan akan mampu membantu membuka wawasan masyarakat terhadap berbagai informasi positif yang tersedia.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pengguna layanan selular di daerah ini, Telkomsel terus meningkatkan kualitas layanan dengan membangun infrastruktur guna memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat. Hingga September 2014, Telkomsel telah membangun lebih dari 670 BTS di wilayah Papua–Maluku dan berencana untuk terus menambah pembangunan hingga Desember 2014 (Timurnews, 2014). Data dari Timurnews menyebutkan bahwa hingga September 2014 Telkomsel memiliki lebih dari 4 juta pelanggan di wilayah Papua dan Maluku (tumbuh sekitar 14 persen dibandingkan September 2013), di mana 1,3 juta pelanggan berada di wilayah Jayapura. Sedangkan dari sisi pengguna layanan data, hingga September 2014 terdapat 1,8 juta pengguna di wilayah Papua dan Maluku, dengan angka pertumbuhan sebesar 14 persen dibandingkan September 2013. Dengan pembangunan infrastruktur ini diharapkan di masa mendatang, kesenjangan digital khususnya dalam penggunaan internet di wilayah perbatasan dapat terpenuhi.

Jika melihat angka literasi internet masyarakat di perbatasan ini, sangat jauh tertinggal dengan literasi internet bagi masyarakat yang berada di perkotaan atau daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang sangat memadai. Hal yang sama juga dihasilkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Imran (2010) tentang “Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat Pedesaan”. Temuan survei di pedesaan Tua Tunu (Pekot Pangkal Pinang dan Air Duren (Kabupaten Bangka) Provinsi Bangka Belitung menunjukkan bahwa responden pedesaan umumnya memiliki kadar

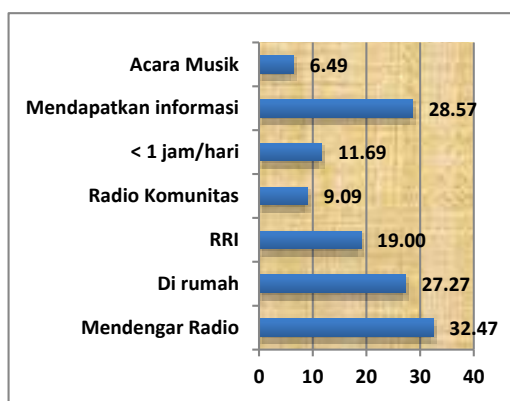
literasi TIK yang rendah. Sebagian kecil saja di antaranya yang memiliki kadar literasi TIK tinggi dengan karakteristik dari anggota masyarakat pedesaan kelompok *Xers* dan *Millenial*. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa di lingkungan masyarakat pedesaan ternyata tidak seluruhnya tergolong pada masyarakat yang kesenjangan digitalnya lebar. Namun, bagian terbesar dari mereka cenderung menjadi sulit untuk bisa memaksimalkan peran TIK dalam konteks kepesertaan anggota masyarakat pedesaan sebagai masyarakat informasi. Ada indikasi bahwa faktor-faktor karakteristik menyangkut kelompok umur; jenis pekerjaan; tingkat pendidikan; keterlibatan dalam kursus komputer; dan kosmopolitanisme, berhubungan dengan kadar literasi TIK masyarakat pedesaan.

Penelitian lainnya berjudul “Literasi Media pada Anak di Daerah Perbatasan Indonesia dan Timor Leste” yang dilakukan oleh Judhita (2013). Hasil penelitian mengungkapkan, tingkat literasi media anak untuk kategori mengakses media hasilnya berbeda. Untuk televisi, responden berada pada level 5 yaitu pengguna telah paham penggunaan dan tujuan mengakses televisi. Radio pada level 3 di mana anak telah dapat mengidentifikasi perangkat yang digunakan meski hanya secara dangkal. Dan internet pada level 2 yaitu pengguna menunjukkan sedikit interaksi (lemah) terhadap media tersebut. Meski dari segi kuantitatif jumlah ini terbilang rendah (kecuali televisi) namun rata-rata responden telah sampai pada level 5 untuk indikator literasi media lainnya yaitu mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan yang diterima dari media.

Literasi Media Radio

Media yang juga dikaji dalam penelitian ini adalah radio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan radio sangat rendah. Hasil penelitian riset *Broadcasting Board of Governors*, Gallup, Amerika Serikat, sebagaimana dikutip laman RRI Semarang (Romelteamedia, 2014) mengungkapkan jumlah pendengar radio di Indonesia menurun drastis. Hasil riset yang dipublikasikan VOA Indonesia jelang akhir 2012 itu juga menunjukkan bahwa hanya 11% memperoleh informasi dari radio. Berdasarkan

hasil riset tersebut disimpulkan bahwa masa keemasan radio lambat laun mulai memudar. Hampir semua keunggulan media radio yaitu cepat, gudang lagu, dan *portable (mobile, flexible)* telah diungguli oleh internet. Saat ini orang hanya mendengarkan radio ketika berkendara saja (mobil) dan hanya untuk mendengarkan lagu/mencari hiburan semata dan juga untuk mendengarkan info lalu lintas.



Grafik 4. Literasi Media Radio

(Sumber: Data primer diolah, 2014. n=77)

Hal ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nielsen (2011) yang menunjukkan bahwa radio yang merupakan salah satu media massa hingga kini masih dikonsumsi oleh 30% dari populasi di 9 kota besar di Indonesia. Dan mayoritas pendengar radio adalah hanya kaum muda yang berusia antara 20-39 tahun. Meski demikian, jam mendengarkan radio di segmen ini cenderung berkurang seiring dengan meningkatnya aktivitas harian mereka, mulai dari bekerja, berbelanja, berekreasi, menghabiskan waktu bersama keluarga, hingga mengonsumsi media selain radio.

Salah satu program dalam desa informasi di wilayah perbatasan adalah radio komunitas yang didirikan oleh komunitas di suatu daerah. Dalam penelitian ini ada radio komunitas di desa Arso (Kerom) yang diberdayakan oleh Kemkominfo. Namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa radio komunitas juga jarang didengar oleh masyarakat setempat. Hasil penelusuran di lapangan saat penelitian ini berlangsung (Mei 2014) menunjukkan bahwa radio komunitas di desa Arso (Kerom) sudah beberapa bulan tidak lagi mengudara karena kerusakan infrastruktur dan belum diperbaiki karena tidak adanya anggaran.

Jika keberadaan radio komunitas di wilayah-wilayah perbatasan ini dapat dipelihara dengan baik dan terus dimaksimalkan dengan meminimalkan sumber-sumber permasalahan seperti masalah keuangan, infrastruktur, dan sumber daya manusia, maka media ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai media informasi masyarakat desa di perbatasan. Seperti hasil penelitian yang dilakukan Juditha (2012) berjudul "Peran dan Fungsi Radio Komunitas Desa Silawan sebagai Media Informasi bagi Masyarakat di Perbatasan RI-Timor Leste". Hasil studi menyimpulkan bahwa radio komunitas desa Silawan telah menjalankan fungsi dan perannya sebagai media penyampai aspirasi warga dan informasi yang dibutuhkan warga setempat/komunitas, dan sebagai media penyampai program pemerintah desa/dusun/kelurahan maupun kecamatan. Namun media ini belum berperan dan berfungsi sebagai media yang dapat menggali masalah serta mengembangkan potensi desa dan komunitas yang ada di desa Silawan.

Menurut Masduki (2007) radio komunitas sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran Indonesia secara praktik ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya.

Keberadaan radio komunitas juga untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dengan memandang asas-asas seperti, Hak Asasi Manusia yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran; keadilan yaitu bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan sistem penyiaran yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan, pengalokasian, dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus tetap berlandaskan pada asas keadilan bagi semua lembaga penyiaran dan pemanfaatannya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya, sehingga terwujud *diversity of*

ownership dan *diversity of content* dalam dunia penyiaran; Informasi yaitu bahwa lembaga penyiaran (radio) merupakan media informasi dan komunikasi yang mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal di masyarakat, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, serta perekat sosial; *Radio Based Community Development and Disaster Risk Reduction* yaitu peran radio komunitas telah dikembangkan menjadi sarana pengembangan komunitas dan program pengurangan risiko; sebagai Promosi Budaya Lokal yaitu radio komunitas memiliki peran yang cukup penting dalam mempromosikan budaya lokal tempat radio komunitas didirikan; dan sebagai Kontrol Pembangunan yaitu peran radio komunitas juga mempunyai fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah di daerah tempat radio komunitas didirikan (Masduki, 2007).

Hanya saja keberadaan radio komunitas yang seharusnya memberikan nilai tambah bagi komunitasnya, tidak mudah untuk meraih tujuan awal seperti yang sudah ditetapkan para ahli media. Ini karena banyaknya kendala yang ditemui di lapangan. Hal ini juga terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Eddyono (2012) yang berjudul “Radio Komunitas dan Kegagalannya Sebagai Media *Counter Hegemony* (Studi Kasus pada Radio Panagati dan Angkringan Di Yogyakarta)”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sebenarnya radio komunitas mampu menawarkan alternatif tayangan yang dibutuhkan pendengarnya, bukan berdasarkan keinginan segelintir orang ataupun pasar. Posisinya bisa disebut sebagai media perlawanan *counter hegemony*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa matinya dua radio komunitas tersebut karena didominasi faktor eksternal, meliputi adanya aturan yang dikeluarkan negara/pemerintah untuk membatasi gerak-gerik radio komunitas. Akibatnya, radio komunitas tak bisa berbuat untuk menyelesaikan persoalan internal yang sudah sejak lama ada. Jika pemerintah benar-benar ingin mendukung keberadaan radio, sejumlah aturan yang membebani radio komunitas harus dihapus.

Sementara itu radio komunitas yang juga berada di wilayah perbatasan juga cenderung mandeg. Keberadaannya yang mulai marak sejak 2009 dinilai sejumlah pihak belum efektif. Radio komunitas yang berfungsi menumbuhkembangkan nasionalisme masyarakat perbatasan dinilai belum maksimal. Pasalnya, banyak radio komunitas perbatasan yang berhenti beroperasi meski belum lama dibuka.

Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Sinam M Sutarno (Solopos, 2012) menjelaskan mereka mendukung adanya radio komunitas perbatasan. Namun, pelaksanaan program kerja radio tersebut perlu dievaluasi, terutama persiapan sosialisasi dan organisasi radio. Kaderisasi juga sangat penting agar pembuatan radio tersebut tak sekadar program pemerintah yang kemudian tak ada evaluasi.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mochamad Riyanto (Solopos, 2012) juga berpendapat bahwa radio komunitas yang berada di wilayah perbatasan memang perlu didampingi oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI). Mengingat keberadaan radio itu yang cukup penting untuk mempertahankan nasionalisme serta untuk menyelamatkan unsur-unsur kebhinekaan masyarakat perbatasan. Sekaligus sebagai alat untuk menyalurkan informasi dari pusat ke daerah-daerah pelosok tersebut. Karena itu dibutuhkan juga peraturan daerah untuk mewajibkan hasil rapat dan pengumuman dari pejabat terkait untuk disiarkan secara langsung di radio komunitas.

Masyarakat yang berada di perbatasan memiliki kesamaan karakteristik dengan masyarakat di daerah-daerah terpencil seperti yang ada dalam penelitian Imran di atas, yaitu sama-sama kurang memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet yang memadai. Sehingga hal ini memungkinkan adanya indikasi rendahnya literasi TIK masyarakat yang menjadikannya sulit untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat informasi. Dengan merujuk Young (1999) literasi TIK disebutkan sebagai kombinasi seseorang pada kemampuan intelektual, konsep dasar, dan keterampilan kontemporer yang harus dimiliki seseorang untuk menavigasi dan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.

Rendahnya literasi TIK untuk media internet memungkinkan proses pembentukan masyarakat informasi semakin lambat. Karena jika menilik definisi masyarakat informasi, maka hal tersebut masih jauh dari harapan. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang mendapat kesempatan dan akses informasi secara cepat dan tepat akan jauh lebih maju dibandingkan mereka yang kurang bernasib baik dalam hal perolehan informasi. Misi utama masyarakat informasi menurut Pendit (2005) adalah mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi dan terdokumentasi, serta tersebarnya informasi ke masyarakat luas secara cepat, tepat dan bermanfaat.

Masyarakat informasi ditandai dengan adanya perilaku informasi yang merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berhubungan dengan sumber dan saluran informasi, perilaku penemuan informasi yang merupakan upaya dalam menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu, perilaku mencari informasi yang ditujukan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi, dan perilaku penggunaan informasi yaitu perilaku yang dilakukan seseorang ketika menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya.

Jika mengacu pada hal tersebut di atas, maka perwujudan masyarakat informasi di wilayah perbatasan masih jauh dari harapan dan juga membutuhkan waktu yang relatif masih lama. Padahal seperti yang didengungkan oleh pemerintah dalam Renstra Kominfo 2010-2014 bahwa Indonesia akan terkoneksi dari Sabang hingga Papua. Sektor komunikasi dan informasi akan mencapai terwujudnya masyarakat informatif yang sejahtera telah menetapkan beberapa *miles stone* penting bagi bangsa ini. Pada tahun 2013, Indonesia ditargetkan memasuki era *Indonesian Connected*, kemudian ditargetkan menjadi Indonesia informatif, Indonesia *Broadband*, dan

Indonesia Digital masing-masing tahun 2014, 2015, dan 2018 (Majalah Hict, 2013).

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat sangat literat terhadap media televisi, bahkan televisi telah menjadi media utama bagi responden yang berada di wilayah perbatasan Papua. Media kedua adalah telepon selular. Mayoritas responden sangat melek teknologi ini meski kebanyakan sebatas menelepon dan ber-SMS saja. Sementara untuk internet dan radio merupakan media yang paling sedikit dan jarang dimanfaatkan responden karena infrastruktur jaringan internet yang belum memadai dan tidak memiliki media radio untuk dimanfaatkan sebagai media informasi dan hiburan.

Hasil penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal, antara lain perlu adanya pelatihan-pelatihan bagi masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan tentang literasi media baik dari televisi maupun internet. Sehingga masyarakat khususnya remaja dapat melek informasi dan memilah yang penting bagi diri mereka dan lingkungan. Perlu adanya pelatihan pemanfaatan TIK bagi masyarakat setempat sehingga dapat melek teknologi agar dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Sektor swasta terus menggalakkan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil dan di perbatasan sehingga masyarakat di sana ikut merasakan kemajuan teknologi dan yang dapat segera memenuhi kebutuhan mereka terhadap informasi dan komunikasi.

Daftar Pustaka

- Baran, S. J., and D. K. Davis (2000). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Belmont, Calif: Wadsworth.
- Buckingham, David (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Cambridge UK: Polity Press.

- Eddyono, Aryo Subarkah (2012). *Radio Komunitas dan Kegagalannya Sebagai Media Counter Hegemony, Studi Kasus pada Radio Panagati dan Angkringan Di Yogyakarta*. *Journal Communication Spectrum*, Vol. 2 No. 1 Februari - Juli 2012. http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/view/36/24, Diakses 8 November 2014.
- Grand Design BNPP (2011). <http://www.bnpp.go.id/19-arsip/e-book/69-glossary-sosok-dan-perspektif-2>. Diakses 10 November 2014.
- Hadi, Sutrisno (1981). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Ilmu Psikologi UGM.
- Hobbs, Renee (1999). *Acquisition of Media Literacy Skills among Australian Adolescents*. USA: *Journal of Broadcasting and Electronic Media*.
- Imran, Hasyim Ali (2010). *Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Juli 2010.
- Iriantara, Yosol (2009). *Literasi Media, Apa, Mengapa, Bagaimana*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Juditha, Christiany (2012). *Peran dan Fungsi Radio Komunitas Desa Silawan Sebagai Media Informasi bagi Masyarakat di Perbatasan RI-Timor Leste*. *Jurnal BPPKI Manado*, Agustus 2012.
- Juditha, Christiany (2013). *Literasi Media pada Anak di Daerah Perbatasan Indonesia dan Timor Leste*. *Jurnal IPTEK-KOM*, Vol. 15 No. 1 Juni 2013: hlm 47-62.
- Majalah Hict (3 Desember 2013). *Kementerian Kominfo Belum Penuhi RPJM 2010-2014*. <http://majalahict.com/berita-3202-kementerian-kominfo-belum-penuhi-rpjm-20101014.html>. Diakses 8 November 2014.
- Masduki (2007). *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: Penerbit LKIS.
- Morrison (2004). *Periklanan, Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Ramdina Prakarsa.
- Nielsen Newsletter. Edisi 15-31 Maret 2011. http://agbnielsen.com/Uploads/Indonesia/Nielsen_Newsletter_Mar_2011-Ind.pdf. Diakses 8 November 2014.
- Pendit, Putu Laxman (2005). *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia, Seri Perpustakaan dan Informasi 1.
- Primawati, Anggraeni (2011). *Strategi Penggunaan E-TKI Sebagai Wahana Dalam Mengatasi Kesenjangan Informasi*. *Journal Communication Spectrum*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2011 - Januari 2012. http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/view/11/11. Diakses 26 Oktober 2015.
- Rachmat, Jalaludin (1998). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Kriyantono, Rachmat (2006). *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan Informatika. *Renstra Kemkominfo 2010-2014*.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Solopos. 19 Oktober 2012. *Radio Komunitas Perbatasan Belum Efektif*. <http://www.solopos.com/2012/10/19/radio-komunitas-perbatasan-belum-efektif-340527>. Diakses 8 November 2014.
- Supardi, A. (1979). *Statistik*. Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati.
- Timurnews (15 Oktober 2014). *Jaringan 3G Telkomsel Hadir di Perbatasan Indonesia – Papua Nugini*. <http://www>.

- timurnews.com/2014/10/15/198/jaringan-3g-telkomsel-hadir-di-perbatasan-indonesia-papua-nugini/. Diakses 4 November 2014.
- Vivanews (13 Juni 2010). *Pengguna Ponsel di Indonesia Lampau Jumlah Penduduk Internet jadi candu.* <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/512467-pengguna-ponsel-di-indonesia-lampau-jumlah-penduduk>. Diakses 4 November 2014.
- Wahyono, Bayu S. (2011). *Optimalisasi Program Desa Informasi melalui Penguatan Kelembagaan.* Jurnal Penelitian IPTEK-KOM Volume 13, No. 2, Desember 2011.
- Young, C. G. E. (1999). *Managing Your Knowledge for Sustainable Competitive Advantage: A Self Diagnostic Tool to Help Assess the Knowledge Maturity of Your Organization.* Cap Gemini UK Plc.